



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHI SOLEMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **838932**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	12.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000		
2. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 404 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	220.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	104.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.750.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.389.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.389.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.